



Sistem Pendidikan Nasional: Akses, Equity, Financing, Monitoring Dan Evaluasi Tinjauan Kajian Literasi

As'ad^{1*}, Nana Suyana¹, Jupriadi¹, Marhamah²

¹Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Jakarta, Indonesia

*asad.ptunu@gmail.com

Abstract

The background to this research is the need for sustainable quality evenly throughout Indonesia. Education must also be able to actively develop the potential of students, so that they have religious spiritual strength, intelligence, personality, noble morals and skills that are needed by themselves, society, nation and state. To realize educational goals, it is important to ensure the implementation of four pillars: a) access to education, meaning providing convenience and equal opportunities for everyone to obtain education. Apart from access to education, b) equity means justice in obtaining the same educational opportunities for various groups of society, c) financing, meaning that every citizen is obliged to attend primary and secondary education which must be funded by the government, d) monitoring and evaluation, meaning supervision of policies and evaluation in improving and perfecting policy implementation. The aim of this research is to describe the 4 pillars of education (access, equity, financing and evaluation). The research method uses a literature review, using a literature approach. There were 10 articles studied in collecting data taken from the fields of education, access, equity, financing, monitoring and evaluation. The research conclusion reveals that the success of a country's educational goals is to ensure that the four pillars above run well. Equal rights in education is an important aspect of equality and social justice. It is important to provide financing that has been outlined in the APBN according to the portion of each pillar.

Keywords: Education; Access; Equity; Financing; Monitoring; Evaluation

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah perlunya kualitas yang berkesinambungan secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Pendidikan juga harus dapat mengembangkan potensi peserta didik secara aktif, sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, penting untuk menjamin terlaksananya empat pilar: a) akses pendidikan, artinya memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Selain akses terhadap pendidikan, b) pemerataan berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama bagi berbagai kelompok masyarakat, c) pembiayaan, artinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah yang wajib dibiayai oleh pemerintah, d) pengawasan dan evaluasi, artinya pengawasan terhadap kebijakan dan evaluasi dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 4 pilar Pendidikan (akses, pemerataan, pembiayaan, dan evaluasi) baik secara teori dan praktek. Metode penelitian menggunakan kajian Pustaka, menggunakan pendekatan literatur. Terdapat 10 artikel yang dikaji dalam pengumpulan data yang diambil dari bidang pendidikan, akses, pemerataan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi. Kesimpulan penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan

tujuan pendidikan suatu negara adalah memastikan empat pilar di atas berjalan dengan baik. Persamaan hak dalam Pendidikan menjadi aspek penting dalam pemerataan dan keadilan sosial. Pembiayaan yang sudah dituangkan dalam APBN menjadi penting untuk di berikan sesuai dengan porsi masing masing pilar.

Kata Kunci: Pendidikan Nasional; Akses; Equity; Financing; Monitoring; Evaluasi

Pendahuluan

Bangsa Indonesia mempunyai banyak potensi alam yang melimpah dan seharusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang kuat. Salah satu upaya menjadikan bangsa yang kuat, hebat, dan mensejahterakan warganya adalah melalui peningkatan mutu pendidikan nasional (Dewi, 2016). Dengan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum, maka akan mempunyai dampak pada peningkatan mutu Pendidikan yang pada akhirnya dapat memeberikan kontribusi pada bangasa dan negara. Pada Undang-undang No 20 tahun 2003 dijelaskan akan pentingnya potensi peserta didik dari segi ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. Pengembangan karakter peserta didik menjadi perhatian penting dalam kurikulum saat ini. Karakter smenjadi penting ketika peserta didik akan memasuki kehidupan nyata (Wahyuni et al., 2013).

Untuk mewujudkan cita-cita yang besar dan luhur tentang tujuan dan fungsi pendidikan sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 maka perlu dibangun sebuah sistem yang kuat. Sebaik apapun sebuah rencana dan program jika sistemnya lemah, maka rencana dan program tidak akan terlaksana dengan optimal (Cahyani & Marom, 2017). Begitupun dalam dunia pendidikan, maka sangat mendasar dibangun system (Sari et al., 2021) berpendapat bahwa kata sistem berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat di pakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pendidikan adalah (Adha et al., 2019) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia diwarnai banyak kompetisi sedangkan Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan dan Indonesia ada sistem tinggal kelas dan perangkingan siswa, Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas dan perangkingan. Lain halnya dengan (Ilham, 2019). berpendapat dalam penelitiannya berpendapat, bahwa nilai sebagai sarana untuk mengontrol, mengevaluasi, yang tidak diinginkan oleh dunia pendidikan.

Kurikulum pendidikan seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis kehidupan dinamis dan tidak bersifat statis menuju hakekat utama dalam pendidikan yakni memanusiakan manusia. Ratna (2016) berpendapat bahwa dalam konteks dunia pendidikan, sistem Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan proses terbaik supaya peserta didik aktif dan mampu mengembangkan potensi yang tertanam dalam dirinya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ada 3 unsur pokok dalam sistem pendidikan sebagai berikut:

1. Adanya aspek masukan (peserta didik) dengan bercirikan pada internal diri peserta didik diantaranya, bakat, minat, kesehatan jasmani dan rohani.
2. Adanya aspek usaha merupakan upaya proses pendiidkan seperti, kurikulum, pendidik, media, metode, sarana dan prasarana.
3. Adanya aspek hasil dari proses pendidikan yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dari ke 3 penelitian terdahulu diatas, mendeskripsikan dan menjabarkan sistem fungsi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting, karena dapat menjelaskan

secara gamblang sistem pendidikan mulai dari awal hingga akhir. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta akan melengkapi penelitian terdahulu.

Setelah ditetapkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional, maka langkah-langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan strategis agar fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud (Sari et al., 2021). Ada empat kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dalam mengatur jalannya pendidikan yaitu a) Akses pendidikan yaitu kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dalam pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat (Damin, 2004: 247), b) *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, c) Keuangan atau financing sebagaimana di atau dalam UUD 1945 amandemen 4, menyatakan bahwa negara diwajibkan mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah harus menyediakan dana sehingga proses Pendidikan dasar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Semua peserta didik wajib menyelesaikan Pendidikan dasar, termasuk menjadi peserta didik berakhlak mulia dan berkarakter, sehingga cita-cita luhur pembukaan UUD 45 terwujud. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut (Dini, 2013).

Metode

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Kajian Pustaka merupakan kajian yang bersumber dari berbagai informasi data dari berbagai sumber seperti data kualitatif dan kuantitatif dari artikel, penelitian dan sumber lainnya.. Sumber kepustakaan yang banyak digunakan dalam tulisan ini adalah sumber online yaitu google scholar dan sebagian buku cetak. Adapun pengumpulan data dalam tulisan ini diambil berdasarkan hasil pencarian dari kata kunci pendidikan, akses, *equity*, *financing*, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan di berbagai sumber referensi online dan sebagian buku cetak. Dalam mengumpulkan dan menganalisis artikel untuk tulisan ini adalah artikel yang dipublikasikan dalam 15 tahun terakhir bidang ilmu pendidikan yang berkaitan dengan lima kata kunci di atas. Setelah proses seleksi dilakukan, didapat 10 artikel yang dipilih untuk dijadikan sebagai daftar pustaka tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Akses Pendidikan yang luas belum tentu dirasakan oleh semua anak bangsa. Indonesia yang sangat luas, memerlukan akses yang merata, salah satu untuk membuka akses pada anak yang kurang mampu, namun mempunyai bakat dan minat serta prestasi dengan memberikan bea siswa (Gunawan, 2016). Hasil penelitian didasari oleh analisis dan pengembangan lebih lanjut tentang fokus penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi akses pendidikan, *equity*, *financing*, pengawasan dan evaluasi. Berikut ulasanya:

1. Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dalam pelayanan Pendidikan bagi masyarakat. (Fattah, 2013) berpendapat bahwa pemerataan yang dimaksud pada penjelasan di atas mencakup 2 aspek yaitu memperoleh pendidikan dan memperoleh pendidikan yang sama. Sigit (2016) berpendapat bahwa di antara masalah-masalah serius dalam akses pemerataan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis, dimana banyak anak-anak di daerah terpencil atau terisolasi sulit untuk mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berpotensi menjadi generasi yang terpinggirkan dan sulit berkembang.
- b. Faktor ekonomi, banyak keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Beban biaya pendidikan yang tinggi, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan miskin (Maula,dkk, 2023). Dana yang cukup akan memungkinkan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan hal-hal lain terkait penunjang sekolah. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin agar anakanak mereka tetap dapat bersekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di daerah pedesaan. Melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru-guru di daerah terpencil dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah juga harus mendorong rotasi guru dari daerah perkotaan ke pedesaan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Selain upaya dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di daerah mereka (Latif,dkk, 2019). Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. Dengan adanya komitmen dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, diharapkan pemerataan pendidikan dapat terwujud. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan hal ini merupakan investasi yang penting bagi masa depan bangsa.

Undang undang 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapat akses Pendidikan dengan baik. Pemerintah pusat mempunyai kebijakan yang dapat mengatur hak warga untuk memperoleh Pendidikan secara merata tanpa membedakan golongan, agama dan suku. Dana APBN yang telah digelontorkan tiap tahun sudah sangat besar. Sebanyak 20% di alokasikan untuk Pendidikan. Dana sebesar itu diperuntukan untuk semua yang berhubungan dengan pendidikan seperti, dana sertifikasi guru, bea siswa, dana biaya operasional sekolah serta pengeluaran lainnya.



Gambar 1. Akses Digital
(<https://www.kominfo.go.id/content/detail/22211>)

Pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan pemerataan berbagai akses. Pembelajaran daring menjadi suatu pilihan terbaik jika terjadi suatu wabah. Hal ini menjadi suatu cara baru belajar, menggunakan internet (Sunarmintyastuti et al., 2022). Internet menjadi suatu kebutuhan dasar, Ketika digunakan untuk tujuan penting (Saputri et al., 2022). Akses pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti:

a. Pemerataan akses internet diseluruh Indonesia

Akses ini memerlukan dana yang besar. Pemerintah sudah melakukan pemerataan akses internet melalui program BTS 4G. Program ini mampu menjangkau seluruh daerah terpencil yang ada di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan internet diberbagai sekolah, dan pengembangan UMKM, namun sayang ada berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

b. Pemerataan akses transportasi

Tidak dipungkiri bahwa transportasi di daerah pelosok masih minim. Siswa harus menyebrangi sungai dan gunung yang belum mempunyai sarana transportasi. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerjasama agar sarana transportasi dapat diatasi. Bandingkan dengan sarana transportasi di kota yang sedemikian lengkap. Hal ini perlu disejajarkan perlakuannya di kota dan daerah pelosok.

c. Pemerataan guru yang berkualitas.

Guru yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan Pendidikan. Guru yang berkualitas mampu mentransformasi peserta didik dengan cepat. Namun yang jadi permasalahan, tidak seimbang guru berkualitas yang ada di kota dan daerah pelosok. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang program yang telah dilakukan demi pemerataan guru berkualitas.

d. Pemerataan Pendidikan/sekolah yang berkualitas.

Para orang tua murid selalu berharap agar anaknya dapat belajar di sekolah yang berkualitas/sekolah favorit. Namun hal ini menjadikan permasalahan, karena daya tampung sekolah yang kecil, sedangkan peminatnya membludak. Pemerataan sekolah yang berkualitas perlu diupayakan, agar masyarakat mendapat sekolah yang berkualitas.

Pendidikan menjadi perhatian untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Pemerataan Pendidikan yang berkualitas menjadi program penting (Safarah, & Wibowo, 2018). Kesempatan Pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat perlu pemerataan, tidak hanya untuk orang yang berada, namun bagi masyarakat lemah, perlu diberikan kesempatan (Lutfillah.dkk, 2022). Masyarakat yang tidak mampu, namun mempunyai kecerdasan, sebaiknya dapat dibantu (Farida, 2006). Kesadaran untuk bersekolah menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Jika melihat data. Jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 260 juta pada tahun 2022, namun kebanyakan lulusan sekolah dasar. Pemerataan pendidikan sama dengan pemerataan keadilan untuk mendapat Pendidikan(equaty). Persamaan pendidikan memerlukan persamaan perlakuan dalam hal mendapat semua sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Pada pemerataan pendidikan terdapat 2 pemerataan, yaitu pemerataan aktif dan pasif. Pemerataan pasif disini adalah pemerataan pendidikan untuk dapat mendaftar di sekolah, siswa dapat akses luas untuk mendaftar sekolah, termasuk sekolah favorit dan bermutu. Siswa beserta orang tua mampu memilih mana yang dianggap baik untuk bersekolah. Pemerataan aktif dapat diartikan bahwa peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh hasil belajar. Siswa yang sudah terdaftar di sekolah dapat memaksimalkan hasil belajar. Peningkatan akses Pendidikan yang bersifat aktif dan pasif menjadi fokus pemerintah, terutama di daerah pedesaan, dan terpelosok. Pendidikan akan menjadi suatu modal besar bagi bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu

kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Kesejahteraan rakyat akan meningkat jika akses Pendidikan menjadi luas dan merata. Pemerataan Pendidikan masih menjadi persoalan bangsa ini, karena pendidikan lebih condong di pulau Jawa (Narimo,dkk, 2019) Pendidikan diluar pulau Jawa masih kurang, terutama pada bagian wilayah timur, seperti Papua dan sekitarnya.

2. Equity

Equity dapat diartikan keadilan untuk mendapatkan dan merasakan kesempatan Pendidikan. Keadilan kesempatan Pendidikan perlu di tingkatkan, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Persamaan dan equality mempunyai arti kesamaan kesempatan dalam Pendidikan. Pendidikan dapat bermakna meningkatkan keadilan bagi peserta didik agar mendapat hasil optimal education for al bahasa *equity* berarti keadilan dalam rangka memperoleh Pendidikan yang sama. Keadilan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapat akses Pendidikan secara merata (Widiyarto, S., & Purnomo,) Keadilan pendidikan sangat erat dengan hak Pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Keadilan mengandung meningkatnya keadilan dan kesempatan pada peserta didik dalam mengenyam pendidikan dengan hasil yang optimal.



Gambar 2. Kesetaraan Pendidikan
<https://www.umm.ac.id/id/arsip>

3. Financing

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap warga berhak mendapat Pendidikan dasar. Pembiayaan yang sudah di tuangkan ke dalam APBN, merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pendidikan nasional. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan demi persatuan bangsa dan perdaban manusia. Pembiayaan pendidikan merupakan kompo-nen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar.



Gambar 3. Alokasi Dana Pendidikan Tahun 2023
 Sumber: Kementerian Keuangan 2023

Pembiayaan alokasi Pendidikan tahun 2023 mempunyai pesan khusus, bahwa alokasi keuangan Pendidikan dibagi rata kepada siswa, guru dan dana untuk institusi. Jumlah siswa 44,2 juta, peserta didik SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk siswa PAUD sebanyak 6,1 juta peserta didik. Pemerataan tercermin pada dana guru non PNS yang dialokasikan sebanyak 556,9 ribu guru, hal ini menandakan bahwa pemerataan perencanaan keuangan APBN dalam Pendidikan masih nampak.

4. Monitoring dan Evaluasi

Undang undang tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional mengamatkan tentang pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan. Undang undang tersebut di jelaskan Kembali pada Perpu No. 39 tahun 2006, yang menyatakan bahwa monitoring menjadi suatu upaya dan memeriksa serta mengamati suatu kondisi termasuk perilaku dengan tujuan mendapatkan data nyata. Data tersebut dapat dipakai untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Pada jenjang sekolah evaluasi didasari oleh 8 standar. Hal ini menjadi suatu evaluasi taraf sekolah. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan negara.

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi
- c. Standar Proses
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Pengelolaan dan Pengelolaan Administrasi Guru, Administrasi Kesiswaan dan Administrasi Komite
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pembiayaan Pendidikan
- h. Standar Penilaian Pendidikan



Gambar. 4 Standar Kompetensi Lulusan

<https://bpmppjogja.kemdikbud.go.id/dikbudd/>

Pada gambar diatas nampak bahwa pengelolaan sekolah membutuhkan dana dan sarana prasarana yang harus dilengkapi (Nuriyanti et al., 2023) Pendidik dan tendik juga dapat menjadi komponen penting, agar monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik (Takdir et al., 2021). Beberapa penilaian dan evaluasi menjadi aspek penilaian, seperti, proses, isi, sikap, keterampilan dan pengetahuan (Cleopatra et al., 2022).

Kesimpulan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya bagi seluruh rakyat dalam memajukan bangsa dan negara. Pendidikan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan bersaing ditengah tengah dunia yang bergejolak perang. Sumber pangan yang makin berkurang menjadikan akses pendidikan menjadi sempit. Persamaan hak dalam pendidikan menjadi aspek penting dalam pemerataan dan keadilan sosial. Pembiayaan yang sudah dituangkan dalam APBN menjadi penting untuk di berikan sesuai dengan porsi masing masing. Kegiatan Pendidikan perlu di monitoring, agar proses berjalan sesuai rencana. Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam suatu proses program. Pendidikan perlu dievaluasi dari masa ke masa.

Daftar Pustaka

- Adha, M. A., Gordisona, S., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2019). Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145–160.
- Cahyani, G. P., & Marom, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi Di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 270–282.
- Cleopatra, M., Sahrazad, S., Widiyanto, S., Widiarto, T., & Harie, S. (2022). Literasi Digital untuk Pengurus OSIS SMPN 24 Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 739–744.
- Dewi, R. (2016). Jurnal Ilmu Hukum, Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 7(2), 58–71.
- Dini. (2013). *Nonformal Dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini*. Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi.
- Farida, L. (2006). *Upaya pemerolehan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar* [UIN Malang].
- Fattah, N. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, M. A. (2016). Studi Evaluasi Tentang Efektivitas Implementasi Program Pemerataan Pendidikan Dasar Melalui Program Pemberian Beasiswa Retrieval Kepada Siswa Rawan Drop Out (Do) Terutama Miskin Dan Perempuan (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 19(2), 1–28.
- Ilham, D. (2019). Menggagas pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122.
- Lutfillah, M. M., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 126-143\
- Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153-13165.
- Nuriyanti, W., Nurisman, H., Widiarto, T., Sutina, Zeinora, Kusuma, A. M., & Sartono, L. N. (2023). Peran Koperasi Sekolah dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan pada Siswa SMP. *Journal on Education*, 6(1), 1425–1429.

- Narimo, S., Utama, S., & Novitasari, M. (2019). Pembentukan Karakter Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Varidika*, 31(1), 39-44
- Saputri, N. L., Widiyanto, S., Nugroho, N., & Hadi, I. (2022). Penyuluhan Digital Untuk SMP YWKA 2. *Jurnal Pengabdian UntukMu Negeri*, 6(1), 96–102.
- Sari, I. M., Dewi, F. A., Fadila, N., & Rivadah, M. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 98–103.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206-213.
- Sunarmintyastuti, S., Prabowo, H. A., Sandiar, L., Ati, A. P., Harie, S., Sartono, L. N., & Widiyanto, S. (2022). Peran literasi digital dalam pembelajaran daring selama pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(6), 32–36.
- Takdir, M., Zakiyah, K., Khairunnisa, N., & Nuryani, L. K. (2021). Analisis sekolah efektif di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 136–145.
- Wahyuni, A., Tias, A. A. W., & Sani, B. (2013). Peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa. *Makalah Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, Prosiding, Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY*.
- Widiyanto, S., & Purnomo, B. (2023). Freedom to Learn in Ki Hajar Dewantara's Perspective: Historical Studies and Their Relevance to Character Education. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 837-844.